

hari ini lebih kepada edukasi tentang keparlemenan kepada masyarakat berbagai kalangan (Royandiah, 2022).

Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI memiliki tugas yang berbeda dengan Biro Humas DPR RI. Dasar hukum nomenklatur Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI adalah Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI No. 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI sebagaimana diubah dengan Peraturan Setjen DPR RI No. 4 Tahun 2021. Tepatnya pada BAB II, Bagian Ketiga “Deputi Bidang Persidangan”, Pasal 9 ayat e (2021:32). Adapun berdasarkan Paragraf 5 tentang Biro Pemberitaan Parlemen Pasal 150, tugas dari biro ini adalah menyelenggarakan dukungan pemberitaan di media cetak dan media sosial, pengelolaan televisi dan radio, serta pengelolaan urusan penerbitan (2021:53).

Secara lebih rinci fungsi Biro Pemberitaan Parlemen adalah:

1. Penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Biro Pemberitaan Parlemen
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberitaan di media cetak dan media sosial, televisi, dan

radio parlemen, dan penerbitan

3. Penyelenggaraan televisi dan radio (TVR Parlemen)
4. Penyelenggaraan urusan penerbitan
5. Penyusunan laporan kinerja Biro Pemberitaan Parlemen, dan
6. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang Persidangan (pasal 151, hal. 64-65)

Tahapan dan Langkah Taktis Biro Parlemen dalam Manajemen Berita Negatif DPR RI

Hal pertama yang perlu diketahui sebelum tahapan dan langkah adalah komponen bagian yang terdapat dalam Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI. Berdasarkan Peraturan Setjen DPR RI pasal 155 (2021:65), Media Biro Pemberitaan Parlemen terdiri atas bagian Media Cetak dan Media Sosial, bagian Televisi dan Radio Parlemen (TVR), dan bagian Penerbitan.

Dalam mengimplementasikan tugasnya, pada bagian media cetak dan media sosial, Biro Pemberitaan Parlemen membuat perencanaan jangka sedang dan pendek seperti agenda setting dan framing serta pembuatan konten berita

termasuk peliputan kegiatan penting DPR RI. Perencanaan tersebut kemudian diaplikasikan dan dipantau hasil efektivitasnya serta dievaluasi.

Sementara itu, isu-isu yang beredar di media nasional, lokal, maupun online turut dipantau oleh tim Biro Pemberitaan Parlemen untuk kemudian dianalisis dan hasilnya dijadikan acuan untuk mengambil langkah respon. Pemantauan tone berita di media dilakukan secara kombinasi yaitu menggunakan kecerdasan buatan Indonesia Monitoring dan manual asesmen oleh tim. Pemantauan dilakukan baik perhari, perpekan, perbulan, maupun perperiode tertentu. Selain sebagai acuan internal rencana kerja tim internal, data dan hasil analisis berita juga kemudian dilaporkan kepada Sekretariat Jenderal DPR RI maupun jajaran Pimpinan Anggota DPR RI seperti Ketua DPR RI.

Selanjutnya pada bagian televisi, Biro Pemberitaan Parlemen membuat dan mengelola Televisi dan Radio Parlemen (TVR Parlemen) yang dapat disaksikan masyarakat di website TVR Parlemen dan di YouTube channel TVR Parlemen. Bagian Televisi juga melakukan peliputan. Sementara Radio, terdapat Radio Parlemen yang tersedia di

berbagai media online modern berbasis suara seperti Spotify dan Noice. Selain itu, Biro Parlemen juga menjalin hubungan baik dan kerjasama dengan berbagai kanal Televisi dan Radio nasional serta lokal. Biro Parlemen dapat menyuplai berita sementara feedback yang didapatkan untuk DPR adalah eksposur pemberitaan (Pahlevi, 2023).

Di bagian penerbitan, Biro Pemberitaan Parlemen memproduksi buletin yang diberi nama Parlementaria. Seiring perkembangannya menurut Pahlevi (2023) terjadi penurunan kuantitas cetak fisik buletin yang sebelumnya menyentuh 12.000 eksemplar, saat ini hanya berkisar 1200-an eksemplar saja. Hal ini terjadi karena shifting minat masyarakat dari media hardcopy menjadi softcopy. Hal ini juga berkontribusi positif pada penghematan anggaran cetak.

Selain itu, secara umum melalui media cetak dan sosial, televisi dan radio, serta penerbitan, Biro Pemberitaan Parlemen juga turut mengkomunikasikan kinerja positif DPR RI yang bersifat insidental. Seperti ketika menghangatnya isu Meikarta dengan masuknya berbagai pengaduan konsumen yang dirugikan, kemudian dengan cepat DPR RI melakukan pemanggilan kepada

developer Meikarta. Biro Pemberitaan Parlemen dengan sigap dan terukur menaikkan berita ini dalam rangka memberitahukan kepada masyarakat aspirasi dan keluhannya didengar dan segera direspon konkret oleh anggota DPR RI. Juga mengenai suksesnya DPR menekan biaya haji tahun 2023 sehingga peningkatan tidak sebesar yang diajukan oleh eksekutif terkait. Disahkannya UU TPKS turut menjadi pencapaian yang mengundang respon positif kalangan perempuan Indonesia.

Di samping itu maraknya berita negatif bahkan hoax membuat Biro Pemberitaan Parlemen berada pada posisi penting dalam melakukan respon yang tepat sasaran dan cepat dalam rangka manajemen citra lembaga. Langkah Biro Pemberitaan Parlemen dalam menghadapi berita negatif atau hoax adalah dengan melakukan reporting kepada Setjen DPR RI maupun Pimpinan DPR terkait, kemudian meminta pimpinan ataupun anggota DPR RI untuk memberikan klarifikasi maupun pendapat yang kemudian akan dibuatkan press release oleh Biro Pemberitaan Parlemen. Hal ini disebabkan Biro Pemberitaan Parlemen sama seperti Humas DPR RI yaitu tidak memiliki kewenangan dalam menyampaikan

pendapatnya mewakili lembaga DPR RI. Dalam hukumnya, anggota DPR RI yang memegang fungsi speaker.

Citra Negatif DPR : Antara Paradoks dan Kesempatan Perbaikan Kinerja

Pahlevi (2023) menyebutkan bahwa dalam upayanya mencari akar permasalahan tingginya persepsi negatif terhadap DPR RI, Biro Pemberitaan Parlemen telah melakukan survey khusus di kalangan milenial dan Gen-Z sebagai mayoritas pemilih DPR di 2024 nanti terkait pengetahuan mereka tentang DPR, nama-nama anggota, Alat Kelengkapan DPR (AKD), tugas dan fungsi, sampai pada tingkat kepercayaan dan sumber informasi mereka selama ini terkait DPR. Dari hasil survey kinerja DPR dari skala 1-10, hasilnya pada angka 5 koma. Menurut Pahlevi ini belum cukup bagus, tetapi tidak cukup buruk.

Namun ada paradoks yang muncul. Ketika ada pertanyaan basic knowledge tentang tupoksi DPR, banyak dari mereka yang tidak tahu. Milenial menjawab benar di angka 35,6 poin, yang tidak mengetahui 64,4 poin. Sementara Gen-Z yang menjawab benar hanya 25,7 poin yang tidak mengetahui 74,3 poin. Artinya sumber informasi mereka adalah berita-berita di media. Dan hal ini menjadi temuan penting untuk mengatur

melalui media sosial dapat merusak citra DPR RI. Perubahan kebijakan media atau algoritma platform media sosial juga dapat mempengaruhi visibilitas berita yang disebarkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen. Tingginya tingkat ketidakpercayaan publik terhadap DPR RI secara keseluruhan juga menjadi hambatan utama dalam membangun citra positif.

Dalam menghadapi berbagai ancaman ini, Biro Pemberitaan Parlemen perlu menjalankan peranannya dengan cermat. Respon yang tepat sasaran dan cepat terhadap berita negatif, bahkan hoax, menjadi kunci dalam manajemen citra lembaga. Dalam konteks ini, fokus bukan hanya pada pengiriman berita positif tetapi juga pada aspek pengiriman yang harus dipastikan agar pesan tersebut diterima dengan baik oleh masyarakat.

Oleh karena itu, dengan memahami secara menyeluruh analisis SWOT ini, Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI dapat mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk memaksimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghadapi ancaman. Dengan pendekatan yang cermat dan adaptabilitas terhadap perubahan, Biro

ini dapat terus berperan sebagai agen penting dalam membentuk opini publik terhadap DPR RI (Pahlevi, 2023).

Kesimpulan dan Rekomendasi

Carpenter dan Krause (2012) yang pada intinya menekankan bahwa audiens atau publik tidak mengobservasi realitas organisasi seutuhnya, namun hanya citra parsial dari sebuah efektivitas organisasi. Konsepsi ini sebaiknya menjadi kunci pemahaman tim Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI. Secara alamiah konsepsi ini justru diperkuat dengan temuan survey Biro Pemberitaan Parlemen mengenai rendahnya pemahaman tupoksi DPR di kalangan milenial dan Gen-Z. Artinya angka kepercayaan mereka terhadap DPR masih terbilang rendah disebabkan oleh informasi yang didapat langsung dari media-media yang ada, bukan dari aktor cover both side DPR RI, yakni Biro Pemberitaan Parlemen.

Meningkatkan optimalisasi berita positif DPR adalah langkah yang sudah tepat dan perlu terus ditingkatkan secara inovatif dan kreatif. Bagaimana berita positif dari Biro Parlemen tidak hanya bertumpu pada delivery namun juga harus dipastikan delivered. Langkah berkolaborasi dengan TV, Radio, serta media alternatif kekinian seperti Spotify

